**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Revzan, David A., 1961. Marketing Organization Throught The Channel, Wholesaling in Marketing. New York

*Performance, John Wiley & Sons, New York,* 1982

Sumiati, Imas. 2015. *Sampling.* Bandung

Sumiati, Imas. 2015. *Statistik*. Bandung

Handayaningrat, Soewarno, 1995, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan*

*Manajemen,* Jakarta: Cv Haji Masagung

Siagian, Sondang. 2003, *Filsafat Administrasi,* Jakarta: PT Bumi Aksara

Sinambela, Poltak Lijan, 2016, *Reformasi Pelayanan Publik* : *Teori,*

*Kebijakan, Dan Implementasi.* Jakarta : PT. Bumi Aksara

Sudarmanto. 2015. *Kinerja* dan *Pengembangan Kompetensi SDM : Teori,*

*Dimensi Pengukuran, Dan Implementasi Dalam Organisasi.*

Swastha, Basu, 1999. Saluran Pemasaran : Konsep dan Strategi Analisa Kuantitatif. Yogyakarta : BPFE

Walters, C. Glenn, 1977. Marketing Channels. California : *Goodyear Publishing Company.*

Robert N. Anthony and Vijay Govindarajan, 2015. *Management Control System.* Edisi 11 Jakarta : Salemba Empat

Drs. Soeawarno Handayaningrat,1990. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen.* Edisi 10 Jakarta : CV Haji Masagung

M. Manullang, 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Edisi 21 Malang

Drs. Amin Widjaja Tunggal. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi 1 Jakarta : PT Rineka Cipta

Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan. *Manajemen Dasar,Pengertian,dan Masalah.* Edisi Revisi Jakarta : PT Bumi Aksara

1. **Dokumen**

Narasi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

Rencana Kerja 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor` 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737 ).

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksaaan Dalam Pembangunan Daerah.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang penerapan KTP Elektronik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. **Sumber Online**

<http://www.kemendagri.go.id/news/2017/04/12/permudah-layanan-kependudukan-disdukcapil-kota-bandung-hadirkan-mepeling>

<http://disdukcapil.bandung.go.id/>

<https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&as_vis=1&qsp=1&q=pelayanan+administrasi+kependudukan>

<http://kamusbisnis.com/arti/pengendalian-administratif/>